



**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN PENGUNGKAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP DUGAAN PRAKTIK MANAJEMEN LABA  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2012-2014)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Luluk Maknunah**

**NIM 120810301031**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN PENGUNGKAPAN  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP DUGAAN PRAKTIK  
MANAJEMEN LABA  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia Tahun 2012-2014)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana  
Ekonomi

Oleh

**Luluk Maknunah**

**NIM 120810301031**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Umi dan Abiku tercinta yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, semangat, dukungan serta doa yang selalu mengiringi langkahku.
2. Keluargaku, adik-adik ku tercinta yang selalu memberi semangat dan dukungan.
3. Bapak ibu pendidik ku sejak TK hingga perguruan tinggi, terimakasih atas ilmu dan doa yang telah diberikan dengan ikhlas.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan dan bantuan.
5. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

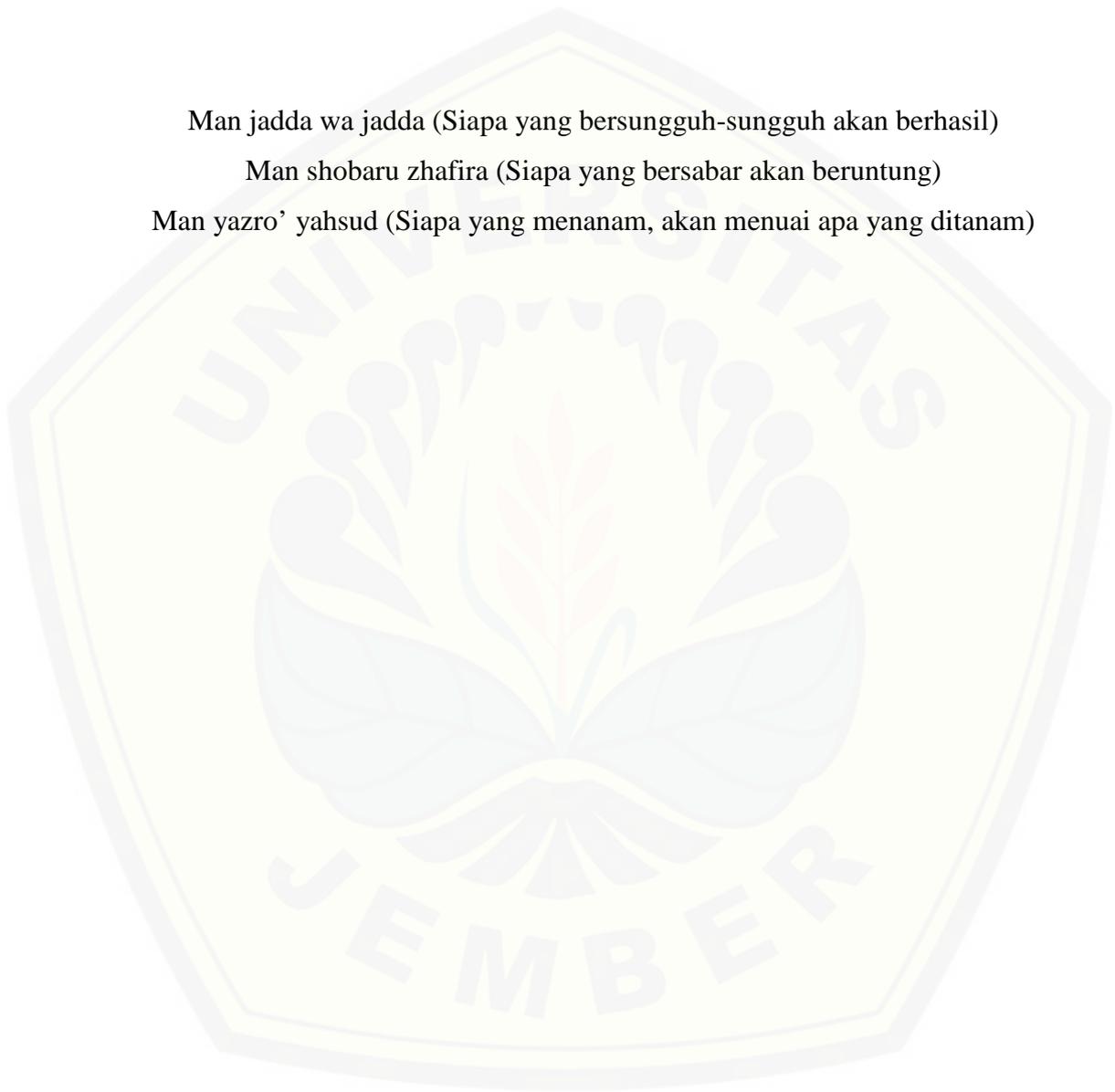
**MOTTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (**Al-Insyiroh ayat 5-6**)

Man jadda wa jadda (Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

Man shobaru zhafira (Siapa yang bersabar akan beruntung)

Man yazro' yahsud (Siapa yang menanam, akan menuai apa yang ditanam)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luluk Maknunah

Nim : 120810301031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN PENGUNGKAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP DUGAAN PRAKTIK MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Mei 2016

Yang menyatakan,

Luluk Maknunah

NIM 120810301031

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN  
PENGUNGKAPAN *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* TERHADAP DUGAAN PRAKTIK  
MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan  
Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2012-2014)

Nama Mahasiswa : Luluk Maknunah  
N I M : 120810301031  
Jurusan : S1 AKUNTANSI  
Tanggal Persetujuan : 28 April 2016

Pembimbing I

Pembimbing II,

Septarina Prita DS, SE., M.SA., Ak  
NIP. 197107271995121001

Indah Purnamawati, SE., M.Si., Ak  
NIP. 196910111997022001

Ketua Program Studi  
S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.  
NIP. 197107271995121001

**SKRIPSI**

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN PENGUNGKAPAN  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP DUGAAN PRAKTIK  
MANAJEMEN LABA  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia Tahun 2010-2014)**

Oleh

**Luluk Maknunah**

**NIM 120810301031**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Utama: Septarina Prita DS, SE., M.SA., Ak**

**Dosen Pembimbing Anggota: Indah Purnamawati, SE. M.Si, Ak.**

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN PENGUNGKAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP DUGAAN PRAKTIK MANAJEMEN LABA  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Luluk Maknunah

NIM : 120810301031

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

16 Mei 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Nining Ika Wahyuni, SE., M.Sc, Ak (.....)  
NIP. 198306242006042001

Sekretaris : Nur Hisammudin, SE., MSA., Ak (.....)  
NIP. 197910142009121001

Anggota : Drs. Wasito, M.Si., Ak (.....)  
NIP. 196001031991031001

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.  
NIP 19630614 199002 1 001

## Luluk Maknunah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan pengungkapan *good corporate governance* terhadap dugaan praktik manajemen laba. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria peneliti selama periode 2012-2014 adalah 57 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi berpengaruh negatif signifikan terhadap dugaan praktik manajemen laba. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap dugaan praktik manajemen laba. Sedangkan kepemilikan asing dan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen laba. Secara simultan, variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen laba.

**Kata kunci :** kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, *good corporate governance*, manajemen laba.

**Luluk Maknunah**

*Accounting Department, Economic Faculty, Jember University*

## ***Abstract***

*This research aimed to examine the effect of ownership structure and good corporate governance disclosure into allegation earnings management practice. The populations in this study were banking companies listed in Indonesia stock exchange in 2012-2014. The samples in this study used purposive sampling method amounting to 57 samples. The data analysis methods used descriptive statistic and classic assumption test. Hypothesis testing used multiple linier regression, coefficient of determination test, F test and T test. The result showed that in partial family ownership, institutional ownership gave negative effect on earnings management practice. government ownership gave positive effect on earnings management practice. foreign ownership and good corporate governance had not influence to earnings management. Simultaneously, family ownership, institusional ownership, government ownership, foreign ownership and good corporate governance had signifikan influence to earnings management.*

***Keywords*** : *family ownership, institutional ownership, government ownership, foreign ownership, good corporate governance disclosure, earnings management*

## RINGKASAN

**Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Pengungkapan *Good Corporate Governance* Terhadap Dugaan Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014);** Luluk Maknunah 120810301031: 2016: 70 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

*Corporate governance* atau tata kelola perusahaan telah menjadi sorotan yang hangat diperbincangkan dalam dunia bisnis. Kajian mengenai *corporate governance* semakin meningkat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar yang terjadi pada perusahaan di negara-negara maju. Penerapan GCG di Indonesia masih tergolong lemah. Rendahnya kualitas GCG pada korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi penyebab kejatuhan perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama industri perbankan.

Isu *corporate governance* juga muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Kepemilikan sejumlah saham tertentu oleh *stakeholder* akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan memiliki tujuan yang berbeda yang tidak selaras dengan tujuan *stakeholder* yang lain. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menimbulkan kemungkinan terjadinya *agency problem*. Perusahaan-perusahaan di Asia secara historis dan sosiologis adalah perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh keluarga. Meskipun perusahaan tersebut telah tumbuh dan menjadi perusahaan publik, namun kendali (*control*) yang berada pada keluarga masih begitu signifikan.

Konflik kepentingan dapat semakin meningkat karena prinsipal tidak dapat selalu memonitor aktivitas manajemen untuk memastikan apakah manajemen telah bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal. Sebaliknya, agen sebagai pihak yang memiliki pengetahuan yang lebih mengenai perusahaan dapat memiliki kesempatan untuk bertindak secara oportunistik atau mementingkan kepentingan pribadi. Sehingga informasi yang disampaikan oleh agen kepada prinsipal terkadang tidak sesuai

dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Keadaan seperti ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*). Asimetri informasi antara pihak manajemen dan pemegang saham dapat menyebabkan terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajer dengan maksud untuk menyesatkan para pengguna informasi laporan keuangan khususnya pemegang saham.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing, dan pengungkapan *good corporate governance* yang diproksikan dengan indeks GCG terhadap dugaan praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahun perbankan tahun 2012-2014. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel berjumlah 19 perusahaan, dengan total 57 sampel selama 3 tahun pengamatan.

Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi berpengaruh negatif signifikan terhadap dugaan praktik manajemen laba. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap dugaan praktik manajemen laba. Sedangkan kepemilikan asing dan *good corporate governance* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap dugaan praktik manajemen laba. Secara simultan, variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen laba.

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia, rahmat, dan tuntunanNya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Pengungkapan *Good Corporate Govenance* Terhadap Dugaan Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI tahun 2012-2014)” Dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Namun, syukur Alhamdulillah banyak pihak-pihak yang membantu serta berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yaitu Abi ku tercinta Bapak Moch. Cholili dan Umi ku tercinta Ibu Umiyati yang telah berperan penting dalam perjalananku selama ini. Terimakasih atas doa yang tak pernah henti dipanjatkan kepada Allah SWT. Terimasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan;
2. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Bapak Ahmad Roziq, SE., M.Si., Ak, selaku dosen pembimbing akademik / dosen wali;
5. Ibu Septarina Prita DS, SE., M.SA., Ak selaku dosen pembimbing 1 yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan dengan penuh kesabaran, serta memberi semangat dan motivasi yang sangat membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Ibu Indah Purnamawati, SE., M.Si., Ak, selaku dosen pembimbing 2 yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, saran, dan masukan

dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Ibu Yosefa Sayekti yang telah membantu membimbing serta memberi masukan dalam mengerjakan skripsi ini;
8. Seluruh bapak dan ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang dengan ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
10. Kedua adikku tersayang yaitu Fatimahtuz Zahro dan Moch Faiz. yang telah memberi doa, semangat dan kasih sayangnya;
11. Sahabatku Rodhiatun Niswah dan Sela Rachmawati yang senantiasa menemani dalam keadaan suka dan duka, saling memberi dukungan, saran dan semangat;
12. Sahabatku Dhika Elvira, Putri Pertiwi terimakasih atas semangat, dukungan, motivasi dan kebersamaan selama kuliah;
13. Sahabat-sahabat ku Holifah, Rifa Naela, Ayu, Rengki, Wisnu dan seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember angkatan 2012. Terimakasih atas doa, bantuan, dukungan, saran dan semangat yang telah diberikan.
14. Sahabatku Risqa Fadhilah yang telah memberi bantuan demi kelancaran dalam mengerjakan skripsi;
15. Keluarga KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal), terimakasih kepada kakak-kakak, teman-teman 2012, dan adik-adik atas doa yang diberikan dan terimakasih juga atas waktu dan pengalaman berharga yang pernah kita lewati selama periode kepengurusan.
16. Sahabatku Defi Nurdiana dan seluruh keluarga kost kenanga terimakasih atas doa dan dukungannya.
17. Keluarga KKN 59 Mas Doni, Mas Rizky, Semi, Fadhil, Ira, Isti, Rosi, Umi, Viki. Terimakasih atas waktu dan pengalaman selama KKN.

18. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



Jember, 10 Mei 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIBINGAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>PRAKATA</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN TEORI</b>	
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	9
2.1.1 Teori Agensi ( <i>Agency Teory</i> ).....	9
2.1.2 Struktur Kepemilikan ( <i>Ownership Strucutre</i> ).....	12
2.1.2.1 Kepemilikan Keluarga ( <i>Family Ownership</i> ).....	13
2.1.2.2 Kepemilikan Institusional ( <i>Institutional Ownership</i> ).....	14
2.1.2.3 Kepemilikan Pemerintah.....	14

2.1.2.4 Kepemilikan Asing.....	15
2.1.3 <i>Good Corporate Governance</i> .....	15
2.1.3.1 Definisi <i>Corporate Governance</i> .....	15
2.1.3.2 Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	17
2.1.4 Manajemen Laba.....	21
2.1.4.1 Definisi Manajemen Laba.....	21
2.1.4.2 Motivasi Manajemen Laba.....	23
2.1.4.3 Pola Manajemen Laba.....	26
2.1.4.4 Teknik Manajemen Laba.....	27
<b>2.2 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>28</b>
<b>2.3 Hipotesis</b> .....	<b>30</b>
2.3.1 Kepemilikan Keluarga dan Manajemen Laba.....	30
2.3.2 kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba.....	31
2.3.3 Kepemilikan Pemerintah dan Manajemen Laba .....	32
2.3.4 kepemilikan Asing dan Manajemen Laba.....	33
2.3.5 <i>Good Corporate Governance</i> dan Manajemen Laba.....	34
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Jenis Penelitian</b> .....	<b>36</b>
<b>3.2 Populasi dan Sampel</b> .....	<b>36</b>
<b>3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel</b> .....	<b>37</b>
3.3.1 Variabel Penelitian.....	37
3.3.1 Definisi Operasioanal Variabel.....	37
3.3.1.1 Variabel Terikat ( <i>Dependen Variable</i> ).....	37
3.3.1.2 Variabel Bebas ( <i>Independen Variable</i> ).....	38
<b>3.4 Rancangan Penelitian</b> .....	<b>40</b>
<b>3.5 Data dan Sumber Data</b> .....	<b>40</b>
<b>3.6 Metode Pengumpulan Data</b> .....	<b>41</b>
<b>3.7 Metode Analisis Data</b> .....	<b>41</b>
3.7.1 Statistik Deskriptif .....	41

3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	42
3.7.3 Uji Hipotesis .....	44
3.7.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	44
3.7.3.2 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	45
3.7.3.3 Uji Statistik (f-test) .....	45
3.7.3.4 Uji Statistik t (t-test).....	45
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.1.1 Pemilihan Sampel Penelitian .....	46
4.2 Analisis Data .....	47
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	47
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	49
4.2.2.1 Uji Normalitas Data .....	49
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas.....	52
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas .....	53
4.2.2.4 Uji Autokorelasi .....	54
4.3 Uji Hipotesis.....	55
4.4 Pembahasan .....	59
4.4.1 Kepemilikan keluarga dan manajemen laba .....	59
4.4.2 Kepemilikan Instiusional dan manajemen laba .....	60
4.4.3 Kepemilikan pemerintah dan manajemen laba .....	61
4.4.4 Kepemilikan asing dan manajemen laba.....	62
4.4.5 <i>Good Corporate Governance</i> dan manajemen laba.....	62
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	65
5.3 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

**LAMPIRAN**

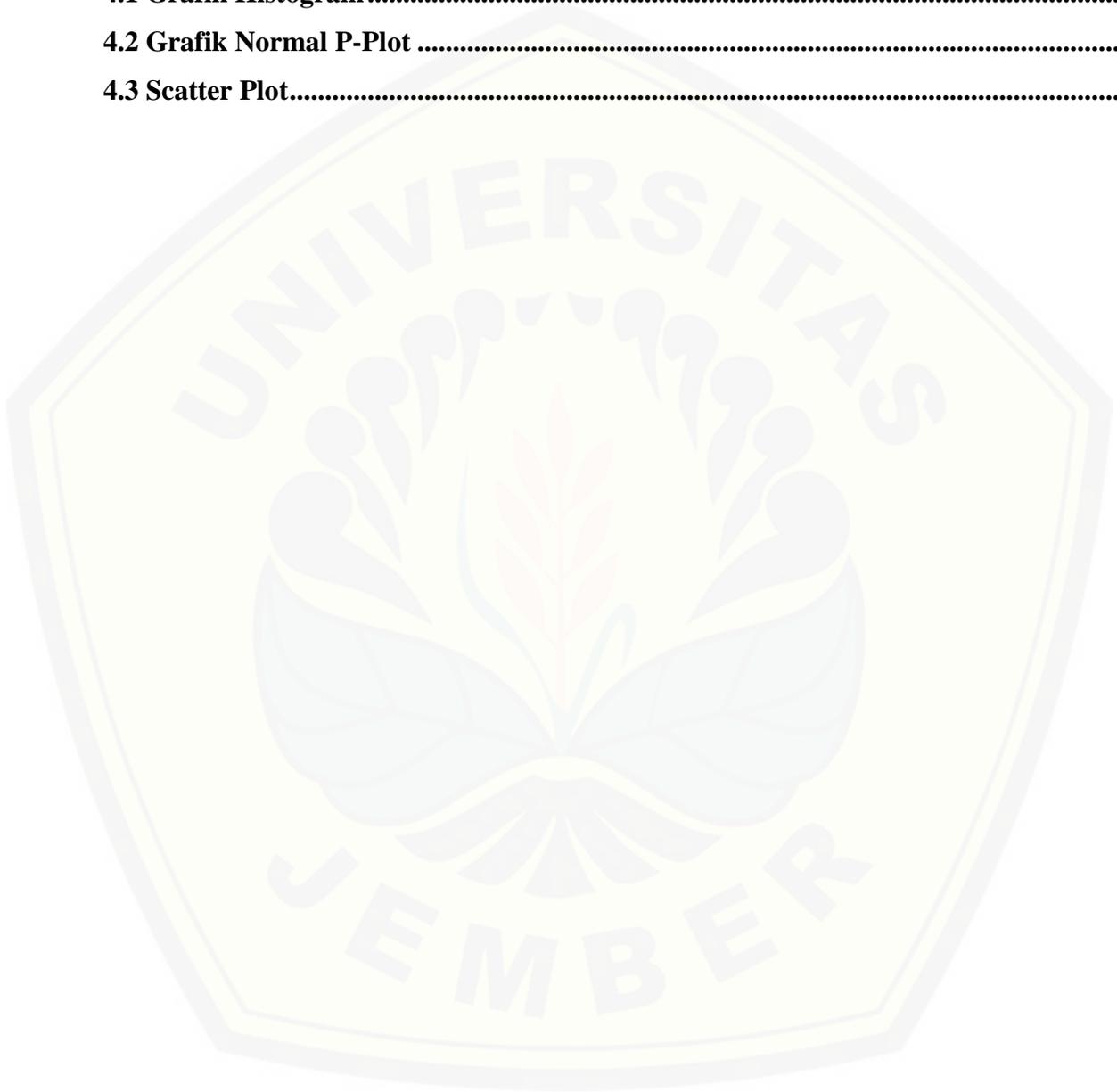


**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>4.1 Sampel Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>4.2 Statistik Deskriptif .....</b>	<b>47</b>
<b>4.3 Hasil Uji Normalitas Data .....</b>	<b>51</b>
<b>4.4 Hasil Uji Multikolonieritas.....</b>	<b>52</b>
<b>4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....</b>	<b>54</b>
<b>4.6 Hasil Uji Koefisien Determinan (<math>R^2</math>).....</b>	<b>56</b>
<b>4.7 Hasil Uji F (<i>F test</i>) .....</b>	<b>57</b>
<b>4.8 Hasil Uji T (<i>T test</i>).....</b>	<b>57</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
<b>4.1 Grafik Histogram .....</b>	<b>50</b>
<b>4.2 Grafik Normal P-Plot .....</b>	<b>51</b>
<b>4.3 Scatter Plot.....</b>	<b>53</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel Perbankan**

**Lampiran 2 Variabel Independen Dan Dependen**

**Lampiran 3 *Cheklis Good Corporate Governance***

**Lampiran 4 Hasil Pengujian Hipotesis Dan Uji Asumsi Klasik**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*Corporate governance* atau tata kelola perusahaan telah menjadi sorotan yang hangat diperbincangkan dalam dunia bisnis. Kajian mengenai *corporate governance* semakin meningkat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar yang terjadi pada perusahaan di negara-negara maju. Seperti kasus perusahaan Enron yang melibatkan KAP Arthur Anderson, kasus Merck, dan World Com. Di Indonesia sendiri *corporate governance* menjadi perhatian yang serius sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Diduga krisis ekonomi tersebut disebabkan karena lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Baird (2000) dalam Maksim (2005), menyatakan bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta.

Menurut Daniri (2005) dalam Kaihatu (2006), istilah GCG tidak hanya semakin populer tetapi juga ditempatkan pada posisi terhormat. Alasannya yaitu, Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Seperti yang telah diketahui bahwa penerapan GCG di Indonesia masih tergolong lemah. Survey dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks *corporate governance* paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas GCG pada korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi penyebab kejatuhan perusahaan-perusahaan

di Indonesia (Kaihatu, 2006). Runtuhnya korporasi pada masa orde baru khususnya industri perbankan juga tidak lepas dari lemahnya penerapan *Good Corporate Governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Mitton (2002) dalam Siagian (2011), menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan berada dalam kondisi yang lebih baik selama krisis ekonomi.

Krisis ekonomi 1998 membawa dampak sangat besar bagi banyak negara Asia termasuk Indonesia. Dengan adanya krisis tersebut pemerintah akhirnya membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) pada tahun 1999 kemudian diganti menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2004 sebagai tanda era penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia secara formal, dengan menerbitkan “Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia” (Hadiprajitno, 2013). Hal ini menunjukkan peran pemerintah yang berupaya untuk membenahi kondisi *corporate governance* di Indonesia pasca krisis ekonomi. Selain pembentukan KNKG, dalam penelitian Siagian (2011) menyebutkan upaya pemerintah yang lain dalam meningkatkan *corporate governance* misalnya, Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki komisaris independen dan komite audit independen pada akhir tahun 2002 (Siagian & Tresnaningsih, 2011). Pada tahun 2002, Otoritas Pasar Modal Indonesia (BAPEPAM) menerbitkan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik (P3LKE) untuk perusahaan publik dalam rangka meningkatkan pelaporan perusahaan dan pengungkapan kualitas (BAPEPAM, 2002).

Isu *corporate governance* juga muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (Gunarsih, 2003 dalam Rebecca dan Siregar, 2012). Kepemilikan sejumlah saham tertentu oleh *stakeholder* akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan memiliki tujuan yang berbeda yang tidak selaras dengan tujuan *stakeholder* yang lain. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menimbulkan kemungkinan terjadinya *agency problem* yang dapat menyebabkan *agency conflict*, yaitu konflik yang timbul sebagai akibat keinginan manajemen (*agent*) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan

kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (*principal*) (Rebecca dan Siregar, 2012).

Konflik kepentingan terjadi dalam struktur kepemilikan perusahaan (*ownership structures*) yang terdiri dari kepemilikan yang tersebar (*dispersed ownership*) kepada *outside investor* (pemegang saham publik) dan struktur kepemilikan dengan pengendalian pada segelintir pemegang saham saja (*concentrated ownership*). Perusahaan-perusahaan di Asia secara historis dan sosiologis adalah perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh keluarga. meskipun perusahaan tersebut telah tumbuh dan menjadi perusahaan publik, namun kendali (*control*) yang berada pada keluarga masih begitu signifikan (Surya dan Yustiavandana, 2006:3).

Konflik kepentingan dapat semakin meningkat karena prinsipal tidak dapat selalu memonitor aktivitas manajemen untuk memastikan apakah manajemen telah bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal. Sebaliknya, agen sebagai pihak yang memiliki pengetahuan yang lebih mengenai perusahaan dapat memiliki kesempatan untuk bertindak secara oportunistik atau mementingkan kepentingan pribadi. Sehingga informasi yang disampaikan oleh agen kepada prinsipal terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Keadaan seperti ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*) (Haris, 2004 dalam Widiatmaja, 2010).

Adanya asimetri informasi tersebut dapat mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen. Agen dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen (Ujiyantho, 2007 dalam Widiatmaja 2010). Asimetri informasi antara pihak manajemen dan pemegang saham dapat menyebabkan terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajer dengan maksud untuk menyesatkan para pengguna informasi laporan keuangan khususnya pemegang saham (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Secara umum manajemen laba (*earnings management*) didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008). Tindakan manajemen laba tersebut dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk mengambil keputusan, karena manajemen laba merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sasaran komunikasi antara manajer dan pihak eksternal perusahaan (Indriani, 2010).

Perilaku manipulasi oleh manajer berupa *earnings management* yang berawal dari konflik kepentingan ini dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut. Mekanisme yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut salah satunya adalah mekanisme *corporate governance* (Pradipta, 2011). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007). Setiawan (2009) menyatakan bahwa penerapan konsep *good corporate governance* secara konsisten diindikasikan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadi penghambat aktivitas manajemen laba. *Good corporate governance* berkaitan dengan memotivasi perilaku manajerial dengan benar untuk meningkatkan bisnis yang secara langsung dapat mengendalikan perilaku manajer.

Wardhani (2006) dalam Verawati (2012) menyatakan bahwa *agency conflict* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan menggambarkan komposisi kepemilikan saham dari suatu perusahaan. Struktur

kepemilikan juga menjelaskan komitmen pemilik untuk mengelola dan menyelamatkan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh seseorang atau kelompok dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula komitmennya untuk menjaga perusahaan yang dimilikinya.

Menurut penelitian Villalonga & Amit, 2010; Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 2002; Anderson & Reeb, 2003a, 2003b yang dikutip dalam penelitian Siagian (2011), menyatakan bahwa kepemilikan mayoritas oleh keluarga adalah umum di Indonesia. Hasil penelitian Achmad (2008) juga menunjukkan bahwa 62,86% perusahaan Indonesia dikendalikan oleh pemilik yang mempunyai kepemilikan mayoritas dan 63,81% perusahaan dimiliki oleh individu atau sekelompok anggota keluarga. Penelitian Anderson *et al* (2002) dalam Siregar dan Utama (2005), mengatakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga mempunyai struktur yang menyebabkan berkurangnya konflik agensi antara pemegang saham dan kreditur, dimana kreditur menganggap kepemilikan keluarga lebih melindungi kepentingan kreditur. Hasil penelitian Arifin (2003) dalam Siregar dan Utama (2005) juga menunjukkan bahwa perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan keluarga atau negara atau institusi keuangan masalah agensinya lebih baik jika dibandingkan perusahaan yang dikontrol oleh publik atau tanpa pengendali utama. Menurutnya, dalam perusahaan yang dikendalikan keluarga, masalah agensinya lebih kecil karena berkurangnya konflik antara *principal* dan *agent*.

Penelitian Hadiprajitno menyebutkan bahwa karakteristik perusahaan di Indonesia yaitu struktur kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusi keuangan. Berdasarkan penelitian Claessens, Djankov, Fan & Lang (2002) dalam penelitian Siagian (2011) juga menyebutkan bahwa pasar Indonesia ditandai dengan kepemilikan signifikan oleh keluarga, kelompok (lebih dikenal sebagai konglomerat Indonesia), investor asing, atau pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas telah disebutkan mengenai isu *corporate governance* dan struktur kepemilikan yang telah dijelaskan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji pengaruh struktur kepemilikan dan

pengungkapan *Good Corporate Governance* terhadap dugaan praktik manajemen laba pada industri keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Struktur kepemilikan yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepemilikan yang mayoritas ada di Indonesia yaitu kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing. Proksi pengungkapan *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan GCG yang dikembangkan oleh Siagian, Siregar, dan rahadian (2011). Selanjutnya, untuk mendeteksi manajemen laba diproksikan dengan akrual kelolaan yang dideteksi dengan model akrual khusus Beaver dan Engel (1996). Model yang digunakan ini mengacu pada penelitian Nasution dan Setiawan (2007), Indriani (2010) dan Amijaya (2013) yang didalamnya menyebutkan bahwa model ini paling sesuai dalam mendeteksi praktik manajemen laba di perbankan.

Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian Siregar dan Utama (2005) yang meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan *corporate governance* terhadap praktik pengelolaan laba. Dan terinspirasi pula oleh penelitian Siagian (2011) yang meneliti mengenai *ownership structure and governance implementation: Evidance from Indonesia*. Berdasarkan pertimbangan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN PENGUNGKAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP DUGAAN PRAKTIK MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen laba?
2. Apakah struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen laba?
3. Apakah struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen laba?
4. Apakah struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan asing berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen laba?
5. Apakah pengungkapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen laba?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen laba dan apakah pengungkapan *good corporate governance* yang diproksikan dengan indeks GCG berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen laba.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

- a. Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan teori.

- b. Para pengguna informasi untuk memahami bagaimana struktur kepemilikan perusahaan dan *good corporate governance* sehingga berguna dalam membuat keputusan yang tepat.
- c. Perusahaan perbankan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait dengan struktur kepemilikan dan *good corporate governance*.



## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan (Widiatmaja, 2010). *Principal* merupakan pemilik perusahaan dalam hal ini yaitu para pemegang saham atau investor, sedangkan *agent* merupakan pihak manajemen yang mengelola perusahaan atau disebut manajer. Secara sederhana teori agensi merupakan teori yang membahas hubungan antara manajer dan investor. Hubungan antara manajer dan investor tidak selamanya berjalan dengan baik, hubungan kedua pihak tersebut biasanya menimbulkan konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara keduanya. Konflik kepentingan ini dikenal dengan konflik agensi.

Dalam kontrak kerja, *agent* sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dana dari *principal* harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepadanya dan sebagai imbalan, *agent* akan menerima insentif berupa berbagai macam fasilitas baik *finansial* maupun *non finansial*. Namun, menurut teori keagenan hubungan antara pihak-pihak tersebut pada hakekatnya sukar tercipta karena ada kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*). Adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan mungkin menyebabkan terjadinya konflik antara *principal* dan *agent*. Dalam hal ini, *agent* termotivasi untuk memaksimalkan *fee* kontraktual yang diterimanya dan *principal* berusaha untuk memaksimalkan *return* atas penggunaan sumber dayanya (Setiawan, 2009).

Kepentingan ini terus meningkat karena pihak *principal* tidak dapat memonitor aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Sebaliknya *agent* sendiri memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan (Aji, 2012). Menurut Haris (2004) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetri*). Asimetri informasi antara pihak manajemen dan pemegang saham dapat menyebabkan terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajer dengan maksud untuk menyesatkan para pengguna informasi laporan keuangan khususnya pemegang saham.

Menurut Muliati (2011) ada dua tipe asimetri informasi : *adverse selection* dan *moral hazard*.

#### 1) *Adverse selection*

*Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan/akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan dari pada para investor luar.

#### 2) *Moral Hazard*

*Moral hazard* adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat

terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar. Naftalia (2013) menyebutkan bahwa *Moral hazard* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar sepengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika tidak layak dilakukan.

Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal memicu terjadinya biaya keagenan. Biaya keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Sekaredi (2011) terdiri dari :

- a. *The monitoring expenditures by the principle* yaitu biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen.
- b. *The bonding expenditures by the agent* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal setelah adanya *agency relationship*.
- c. *The residual loss* merupakan penurunan kesejahteraan prinsipal dan agen yang disebabkan oleh tindakan agen sendiri.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Dengan adanya asumsi sifat dasar manusia tersebut maka seorang manajer akan cenderung bertindak *oportunistic*, yaitu lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dan hal tersebut memicu terjadinya konflik keagenan (Agustia, 2013).

### 2.1.2 Struktur Kepemilikan (*Ownership Structure*)

Burkat, *et.al* (1997) dalam Nugraha (2010) menyatakan bahwa struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari para pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. Besar kecilnya kepemilikan pada suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dalam perusahaan. Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing. Konflik kepentingan terjadi dalam struktur kepemilikan perusahaan (*ownership structures*) yang terdiri dari kepemilikan yang tersebar (*dispersed ownership*) kepada *outside investor* (pemegang saham publik) dan struktur kepemilikan dengan pengendalian pada segelintir pemegang saham saja (*concentrated ownership*).

Konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham dalam struktur kepemilikan yang tersebar sangat mudah terjadi. Hal ini dikarenakan kurangnya insentif bagi pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap manajer karena biaya pengawasan yang dibutuhkan relatif tinggi. Struktur kepemilikan yang tersebar memang dapat memberikan manfaat dalam hal pemberian kesempatan yang lebih besar kepada manajer untuk mengembangkan inisiatif, namun kurangnya pengawasan terhadap manajer dapat berdampak semakin besar peluang untuk melakukan suatu tindakan dan keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan para pemegang saham. Konflik ini akan semakin parah jika manajer merupakan seorang *outsider* (manajer yang tidak mempunyai kepemilikan saham perusahaan) (Nugraha, 2010).

Struktur kepemilikan terkonsentrasi terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pemegang saham mayoritas (*majority shareholders*) atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) dan pemegang saham minoritas (*minority shareholders*). Pemegang saham mayoritas mempunyai insentif yang lebih besar untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap keputusan perusahaan karena mereka merasakan manfaat yang besar dari pengawasan tersebut. Pemegang saham

mayoritas juga memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan *takeover bid* terhadap suatu perusahaan yang tidak dikelola dengan baik karena mereka akan menerima manfaat peningkatan harga saham sebagai hasil perbaikan manajemen. Namun demikian, masalah yang terjadi dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi adalah konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Nugraha (2010).

#### **2.1.2.1 Kepemilikan Keluarga (*Family Ownership*)**

Terdapat berbagai definisi mengenai kepemilikan keluarga dalam berbagai literatur. Definisi kepemilikan keluarga yang digunakan La Porta *et al* (1999) dan Arifin (2003) dalam Hadiprajitno (2013) yaitu perusahaan yang dimiliki oleh individu dan perusahaan lokal, tidak termasuk kepemilikan asing. Definisi keluarga dalam suatu perusahaan yang digunakan dalam penelitian Siregar dan Utama (2005) mengikuti definisi yang digunakan oleh Arifin (2003) yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan >5% wajib dicatat) yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat).

Beberapa definisi yang dikemukakan peneliti yang dikutip dalam penelitian Darmaji dan Sodikin (2013) misalnya Morck dan Yeung (2004) mengidentifikasi kriteria perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga yaitu: pemegang saham terbesar adalah keluarga tertentu dan keluarga pengendali memegang 10 atau 20 persen dari saham dengan hak suara. Menurut Chrisman *et al* (2004), perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga menunjukkan keterlibatan keluarga dalam hal kepemilikan saham, manajemen, dan suksesi antargenerasi antara anggota keluarga. Selain itu, Westhead dan Cowling (1998) berpendapat bahwa karakteristik dari perusahaan yang dikendalikan keluarga meliputi: mayoritas sahamnya dimiliki oleh anggota keluarga pengendali yang memiliki hubungan darah atau perkawinan; tim manajemen terdiri dari oleh anggota keluarga pengendali; dan perusahaan yang mengalami kepemilikan antargenerasi. Berdasarkan informasi yang tersedia untuk

publik, Faccio dan Lang (2002) menentukan perusahaan yang dikendalikan keluarga jika pemegang saham yang mengendalikan perusahaan adalah individu atau, perusahaan swasta yang tidak terdaftar.

#### **2.1.2.2 Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, misalnya: asuransi, bank, dana pensiun, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Siregar & Utama, 2006). Kepemilikan institusi keuangan didefinisikan Agrawal dan Mandelker, (1990) dalam Hadiprajitno (2013) sebagai lembaga investasi yang meliputi dana pensiun, bank dan perusahaan *trust, endowments*, reksadana, dan penasehat investasi.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mengurangi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Menurut Barnae dan Rubin (2005) dalam Verawati (2012) menyatakan bahwa investor institusional dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar persentase kepemilikan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan untuk mengawasi manajemen.

#### **2.1.2.3 Kepemilikan Pemerintah**

Kepemilikan pemerintah menurut definisi Shleifer dan Vishny (1994) dalam Hadiprajitno (2013) yaitu perusahaan yang dimiliki pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah. Shleifer dan Vishny (1994) dalam Hadiprajitno (2013) menjelaskan bahwa pada perusahaan kepemilikan pemerintah lebih tidak efisien dibanding yang bukan dimiliki pemerintah. Hipotesis Broadman (1999) dalam Hadiprajitno (2013) mengemukakan bahwa kepemilikan pemerintah justru

memberikan arah tujuan yang jelas bagi manajemen dan berarti dapat menekan biaya keagenan.

#### **2.1.2.4 Kepemilikan Asing**

Anderson dkk (2001) dalam Hadiprajitno (2013) menyatakan Kepemilikan asing didefinisikan sebagai investor / pemegang saham yang berasal dari negara lain (domisili dan legal pendiriannya di luar negeri). Setiawan (2013) menyatakan bahwa Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan hambatan geografis dan bahasa. Hal ini menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan asing lebih dominan menghadapi risiko politik, informasi asimetris dan perlindungan hukum (La Porta *et al.*, 1999 dalam Verawati 2012).

### **2.1.3 Good Corporate Governance**

#### **2.1.3.1 Definisi Corporate Governance**

*Corporate Governance* merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Kajian atas *Corporate Governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan *control*. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara para pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (*dispersed ownership*) (Surya dan Yustiavandana, 2006:24).

Pada akhir tahun 1980-an mulai banyak kesimpulan yang menyebutkan struktur kepemilikan dalam bentuk *dispersed ownership* akan memberikan dampak bagi buruknya kinerja manajemen. Untuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan *Corporate Governance* dilakukan oleh *Bank of England* dan *London*

*Stock Exchange* pada tahun 1992 dengan membentuk *cadbury committe* (komite cadbury), yang bertugas menyusun *Corporate Governance Code* yang menjadi acuan utama (*benchmark*) di banyak Negara (Surya dan Yustiavandana, 2006:24).

Komite *cadbury* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai:

“*Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin keberlangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.”

Sedangkan menurut *International Good Practice Guidance (IFAC 2009)*, *Corporate governance* didefinisikan sebagai serangkaian praktik dan tanggung jawab yang dilakukan oleh dewan (komisaris) dan eksekutif manajemen dengan tujuan memberi arahan-arahan yang strategis, memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai, memastikan bahwa semua resiko dapat dikelola dengan benar, memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara bertanggungjawab (Wulandari, 2013).

*The Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* mengartikan *Corporate Governance* adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan perusahaan. *Corporate Governance* berfungsi untuk mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berperan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota, *stakeholder* non pemegang saham (Wulandari, 2013).

Setiawan (2007) dalam Aji (2012) menjelaskan manfaat dari *corporate governance* adalah entitas bisnis efisien, meningkatkan kepercayaan publik, menjaga *going concern* perusahaan, mengukur kinerja target manajemen, meningkatkan produktivitas, mengurangi distorsi. Manfaat lain dari *corporate governance* adalah

meningkatkan modal, rendahnya biaya modal, meningkatkan kinerja bisnis dan ekonomi serta memberikan pengaruh positif terhadap saham (FCGI *publication*, 2006).

*Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997 dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007).

#### **2.1.3.2 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance***

Berdasarkan Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*), menyebutkan bahwa setiap bank harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan diseluruh jajaran bank. Asas GCG yang harus dipastikan pelaksanaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Asas GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

##### **1. Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan *stakeholder* lainnya (Widiatmaja, 2010).

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Maksum (2005) menyatakan bahwa realisasi dari prinsip akuntabilitas dapat berupa pendirian dan pengembangan komite audit yang dapat mendukung terlaksananya fungsi pengawasan dewan komisaris, juga perumusan yang jelas terhadap fungsi audit internal, khusus untuk bidang akuntansi, penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta diterbitkan tepat waktu juga jelas merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas.

## 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.

Maksum (2005) menjelaskan bahwa prinsip responsibilitas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk prinsip yang mengatur tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan perusahaan. Maka, setiap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku

harus diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas. Selain itu juga harus diingat bahwa ketentuan yang dibuat bertujuan agar tidak merugikan kepentingan pihak tertentu terutama masyarakat.

#### 4. Independensi (*independency*)

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), Bank harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi.

Untuk dapat merealisasikan prinsip independensi maka masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain (KNKG, 2006).

#### 5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Untuk dapat terlaksananya prinsip ini diperlukan ketersediaan peraturan yang melindungi seluruh pihak yang berkepentingan baik pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta pemegang saham asing, membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan - kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perlakuan buruk orang dalam (Tjager *et al.*, 2013 dalam Maksum, 2005). Penetapan tanggungjawab dewan komisaris, direksi, kehadiran komisaris independen dan komite audit, serta penyajian informasi (terutama laporan keuangan) dengan pengungkapan penuh merupakan perwujudan dari prinsip keadilan dan kewajaran (Maksum, 2005).

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikemukakan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) tahun 2004 dalam Wulandari (2013) yaitu:

1. Memastikan dasar bagi kerangka *corporate governance* yang efektif (*Ensuring the basis for an effective corporate governance framework*).

Kerangka *corporate governance* harus meningkatkan pasar yang transparan dan efisien, konsisten dengan aturan hukum dan secara jelas mengartikulasikan pembagian kewajiban antara pengawas, regulator dan otoritas pelaksanaan yang berbeda

2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci (*The rights of shareholders and key ownership functions*)

Kerangka *corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi penggunaan hak-hak pemegang saham.

3. Persamaan perlakuan bagi pemegang saham (*The equitable treatment of shareholders*)

Kerangka *corporate governance* harus memastikan persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh penggantian kembali secara efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

4. Peranan *shareholder* dalam *corporate governance* (*The role of stakeholders in corporate governance*)

Kerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholder* yang ditetapkan oleh hukum melalui *mutual agreement* dan mendorong kerjasama aktif antara korporat dan *stakeholder* dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan dan perusahaan yang memiliki *sustainable*.

5. Pengungkapan dan transparansi (*Disclosure and Transparency*)

Kerangka *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dibuat atas semua hal yang material menyangkut

korporat, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

6. Kewajiban dewan (*The responsibilities of the board*)

Kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang saham.

## 2.1.4 Manajemen Laba

### 2.1.4.1 Definisi Manajemen Laba

Scout (2000) dalam Muliati (2011) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political cost (opportunistic earnings management)*. Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (efficient earnings management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. Sedangkan, Schipper (1989) dalam Ujianto dan Pramuka (2007) menyebutkan bahwa manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

Healy dan Wahlen (1999) dalam Adiasih dan Kusuma (2011) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

“Manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan dalam penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan baik dengan tujuan untuk menyesatkan beberapa pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak (*contractual outcomes*) yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan”.

Definisi manajemen laba yang dikemukakan oleh Healy dan Wahlen (1999) mengandung beberapa aspek. Pertama intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan *judgment*, misalnya *judgment* yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan, seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, tanggungjawab untuk pensiun, pajak yang ditangguhkan, kerugian piutang dan penurunan nilai aset. Disamping itu manajer memiliki pilihan untuk metode akuntansi, seperti metode penyusutan dan metode biaya. Kedua, tujuan manajemen laba untuk menyesatkan *stakeholder* mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini muncul ketika manajemen memiliki akses terhadap informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar.

Menurut Setiawati dan Na'im (2000) dalam Muliati (2011), manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa.

#### 2.1.4.2 Motivasi Manajemen Laba

Secara umum ada beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk berperilaku oportunistik, yaitu motivasi bonus, kontrak, politik, pajak, perubahan CEO, IPO, atau SEO, dan mengkomunikasikan informasi ke investor. Pengelompokan ini sejalan dengan tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif (*positive accounting theory*), yang menjadi dasar pengembangan pengujian hipotesis untuk mendeteksi manajemen laba (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Sulistyanto, 2008), yaitu:

##### 1. *Bonus plan hypothesis*

*Bonus plan hypothesis* menyatakan bahwa “*managers of firms with bonus plans are more likely to use accounting methods that increase current period reported income*”. Ada bukti empiris yang menyatakan bahwa perjanjian (kontrak) bisnis manajer dengan pihak lain merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Ada variabel yang selama diuji berkaitan dengan perjanjian bisnis itu, yaitu bonus atau kompensasi manajerial (*bonus or managerial compensation*) (Sulistyanto, 2008).

Untuk memotivasi kinerja manajer biasanya pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus (Sulistyanto, 2008). Setiawan (2009) menyatakan bahwa dalam kasus ini, kinerja serta insentif (bonus) yang akan diterima oleh manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga manajer akan cenderung berperilaku oportunistik dengan memilih untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Dengan demikian kinerjanya akan tampak baik sehingga manajer dapat memaksimalkan insentif yang diterimanya.

Seandainya pada tahun tertentu kinerja sesungguhnya berada dibawah syarat untuk memperoleh bonus, maka manajer akan melakukan manajemen laba agar labanya dapat mencapai bonus, sebaliknya, jika pada tahun itu kinerja yang diperoleh manajer jauh diatas jumlah yang disyaratkan untuk memperoleh bonus, manajer akan

mengelola dan mengatur agar laba yang dilaporkan (*reported earnings*) menjadi tidak terlalu tinggi. Kelebihan laba sesungguhnya dengan laba yang dilaporkan akan disajikan ditahun berikutnya. Upaya ini membuat manajer cenderung akan selalu memperoleh bonus dari periode ke periode. Akibatnya pemilik perusahaan terpaksa kehilangan sebagian dari kesejahteraannya yang dibagikan kepada manajer sebagai bonus (Sulistyanto, 2008).

### 2. *Debt (equity) hypothesis*

*Debt (equity) hypothesis* menyatakan bahwa “*the larger the firms debt to equity ratio, the more likely managers use accounting methode that increase income*”. Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikan pada periode-periode mendatang (Sulistyanto, 2008).

Salah satu sumber pendanaan perusahaan adalah melalui pinjaman atau kontrak hutang, dimana dalam kontrak tersebut terdapat beberapa persyaratan atau batasan yang harus dipenuhi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan *income increasing* untuk menjaga agar tidak melanggar persyaratan yang ditentukan tersebut. Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan pada pelanggaran terhadap persyaratan kredit, maka semakin besar kecenderungan manajer untuk melakukan praktik manajemen laba (Setiawan, 2009).

### 3. *Political cost hypothesis*

*Political cost hypothesis* menyatakan bahwa “*large firms rather than small firms are more likely to use accounting choices that reduce reported profits*”. Alasan terakhir adalah masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Sejauh ini ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, misalnya

undang-undang perpajakan, *anti-trust* dan monopoli, dan sebagainya. Undang-undang mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu (Sulistyanto, 2008).

Atau dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba besar akan ditarik pajak yang lebih besar dan perusahaan yang memperoleh laba lebih kecil akan ditarik pajak yang lebih kecil pula (Sulistyanto, 2008). Menurut Astuti (2005) dalam Widiatmaja (2010), menyebutkan bahwa motivasi politik timbul karena manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi yang menggunakan estimasi akrual serta pemilihan metode akuntansi dalam rangka menghadapi berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Scott (2000:302) dalam Muliati (2011) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba yaitu:

1) *Bonus Purpose*

Manajer yang memiliki informasi laba bersih perusahaan akan bertindak secara *opportunistic* untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.

2) *Political Motivations*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3) *Taxation Motivations*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

#### 4) Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

#### 5) *Initial Public Offering* (IPO)

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

#### 6) Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang sehat.

### 2.1.4.3 Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba menurut Scott (2000) dalam Muliati (2011) dapat dilakukan dengan cara:

#### 1) *Taking a Bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.

#### 2) *Income Minimization*

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

### 3) *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

### 4) *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

#### **2.1.4.4 Teknik Manajemen Laba**

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dalam Muliati (2011) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

##### 1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi dan lain-lain.

##### 2) Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

##### 3) Menggeser periode biaya dan manfaat

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk peneliti dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan tahun	Judul	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Siregar dan Utama (2006)	Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek <i>good corporate governance</i> terhadap pengelolaan laba	Variabel independen: Kepemilikan institusi, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan, variabel GCG yaitu kualitas audit, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komite audit Variabel dependen: Manajemen laba	Regresi berganda	Ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran pengelolaan laba, kepemilikan institusi dan ketiga variabel GCG tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besaran pengelolaan laba
2	Hadiprajitno (2013)	Struktur kepemilikan, mekanisme tata kelola perusahaan, dan biaya keagenan di Indonesia	Variabel independen: kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi keuangan, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing. Variabel GCG diproksikan dengan proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, rapat dewan komisaris dan komite audit, keberadaan komite	Regresi Multivariat	Kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi dan kepemilikan pemerintah berpengaruh menekan biaya keagenan, kepemilikan asing terbukti berpengaruh positif terhadap biaya keagenan.

			remunerasi Variabel dependen: Biaya keagenan diproksikan dengan biaya operasi manajerial dan perputaran asset		
3	Siagian (2011)	<i>Ownership structure and governance implementation : evidence from Indonesia</i>	Variabel independen : kepemilikan keluarga, anggota kelompok bisnis, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing Variabel dependen: <i>Good corporate governance</i> yang diproksikan dengan indeks GCG	Analisis regresi	Terdapat hubungan yang positif antara skor GCI dan kepemilikan pemerintah. kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusi berhubungan negatif dengan skor GCI. Kepemilikan asing dan anggota kelompok bisnis tidak berpengaruh terhadap skor GCI
4	Setiawan (2013)	Pengaruh <i>earnings power</i> , kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap manajemen laba	Variabel independen: <i>Earning power</i> , kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Variabel dependen: manajemen laba	Regresi linier berganda	<i>Earning power</i> berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, variabel kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

5	Hartanto dan Nugrahanti (2013)	Pengaruh struktur kepemilikan dan struktur modal terhadap manajemen laba	Variabel independen: struktur modal dan struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga. Variabel dependen: manajemen laba	Regresi berganda	kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, <i>leverage</i> dan <i>collaterallizable asset</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
---	--------------------------------	--	---	------------------	--

## 2.3 Hipotesis

### 2.3.1 Kepemilikan Keluarga dan Manajemen Laba

Kepemilikan keluarga sangat umum di Indonesia, hal ini dibuktikan oleh Hasil penelitian Achmad (2008) yang menunjukkan bahwa 62,86% perusahaan Indonesia dikendalikan oleh pemilik yang mempunyai kepemilikan mayoritas dan 63,81% perusahaan dimiliki oleh individu atau sekelompok anggota keluarga. Definisi kepemilikan keluarga yang digunakan La Porta *et al* (1999) dan Arifin (2003) dalam Hadiprajitno (2013) yaitu perusahaan yang dimiliki oleh individu dan perusahaan lokal, tidak termasuk kepemilikan asing. Maury (2006) dalam Siagian (2011) menyatakan bahwa kontrol keluarga mengurangi masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham tetapi menciptakan konflik antara keluarga pengendali dan pemegang saham minoritas jika perlindungan terhadap pemegang saham minoritas lemah.

Hasil penelitian Arifin (2003) dalam Siregar dan Utama (2005) mengatakan bahwa perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan oleh keluarga atau institusi keuangan masalah agensinya lebih baik jika dibandingkan perusahaan yang di kontrol oleh publik atau tanpa pengendali utama. Hasil penelitian Hartanto dan Nugrahanti

(2013) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan keluarga menunjukkan monitoring semakin baik karena rasa tanggung jawab besar sehingga akan semakin menurunkan kemungkinan manajemen laba dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap dugaan praktik manajemen laba.

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H1 : Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap dugaan praktik manajemen laba

### **2.3.2 kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, misalnya: asuransi, bank, dana pensiun, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Siregar & Utama, 2006). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan manajemen (Boediono, 2005). Cornet et al., (2006) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Hasil pengujian Dewi (2013) menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian ini mendukung Madiastuty dan Machfoedz (2003) dalam Siagian (2011) yang menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Penelitian Verawati (2012) juga membuktikan bahwa semakin

besar kepemilikan institusional, maka semakin rendah manajemen labanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap dugaan praktik manajemen laba.

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap dugaan praktik manajemen laba

### 2.3.3 Kepemilikan Pemerintah dan Manajemen Laba

Kepemilikan pemerintah menurut definisi Shleifer dan Vishny (1994) dalam Hadiprajitno (2013) yaitu perusahaan yang dimiliki pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah. Pemerintah yang menanamkan uang negara pada perusahaan lazimnya sesuai dengan tujuan atau kebijakan bidang politik, sosial, ekonomi, maupun lainnya (Shleifer, 1998 dan La Porta *et al.*, 1999 dalam hadiprajitno, 2013). Tujuan pemerintah menanamkan uang negara pada suatu perusahaan tentunya untuk memperoleh *return* yang lebih besar dari hasil investasi tersebut. Menurut Farhana (2015) di Malaysia, pemerintah memiliki partisipasi yang signifikan dalam perekonomian negara, terutama dengan memiliki kepemilikan di perusahaan Malaysia. Seperti penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan bahwa GLCs (*Government linked Companies*) biasanya dilindungi oleh pemerintah, penelitian ini memprediksi bahwa GLCs mungkin terlibat lebih praktik manajemen laba. Marciano (2008) dalam Wiranata dan Nugrahanti (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh para birokrat memiliki tujuan yang didasarkan pada kepentingan politis dan bukan untuk menyejahterahkan masyarakat dan kepentingan itu sendiri. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya kontrol dari pihak pemerintah terhadap pihak manajer sebagai pengelola perusahaan.

Penelitian Farhana (2015) meneliti perusahaan pemerintah dan non-pemerintah di Malaysia menemukan bukti empiris mengenai dampak kepemilikan pemerintah terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan publik yang terdaftar di Malaysia tidak konklusif karena relatif sulit untuk mendeteksi praktik manajemen

laba. Penelitian tersebut mengharapkan perusahaan pemerintah (GLCs atau *Government linked Companies*) menggunakan praktik manajemen laba yang lebih dibandingkan non GLCs. Uji perbedaan pada residual *augmented modified Model Jones* (Ball dan Shivakumar, 2006 dalam Farhana, 2015) menunjukkan bahwa prediksi penelitian ini benar dalam arti bahwa GLCs melaporkan akrual diskresioner pada tingkat yang lebih tinggi dari dibandingkan dengan non-GLCs. Aharony, Lee dan Wong (2000) dalam Farhana (2015), menemukan praktek manajemen laba pada perusahaan milik swasta lebih rendah dibandingkan dengan BUMN di Cina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap dugaan praktik manajemen laba.

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H3 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap dugaan praktik manajemen laba

#### **2.3.4 kepemilikan Asing dan Manajemen Laba**

Anderson *et al* (2001) dalam Hadiprajitno (2013) menyatakan Kepemilikan asing didefinisikan sebagai investor atau pemegang saham yang berasal dari negara lain (domisili dan legal pendiriannya di luar negeri). Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan hambatan geografis dan bahasa. Hal ini menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan asing lebih dominan menghadapi risiko politik, informasi asimetris dan perlindungan hukum (La Porta *et al.*, 1999 dalam Verawati 2012). La Porta *et al* (1999) dalam Hadiprajitno (2013) menjelaskan bahwa karena investor asing menghadapi risiko lebih ketika berinvestasi dalam ekonomi Negara berkembang (risiko politik, terjadi asimetri informasi dan tidak memadai proteksi legal) maka perhatian pengendalian manajer investor asing relatif tinggi. Tingginya perhatian investor asing menyebabkan manajer berfokus pada pencapaian kinerja perusahaan.

Hasil penelitian Setiawan (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil ini memberikan bukti bahwa semakin tinggi kepemilikan asing maka dapat mengurangi manajemen laba. Hasil tersebut mendukung penelitian Kim dan Yoon (2008) dalam Santoso dan Pudjolaksono (2013) menggunakan sampel perusahaan korea yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan antara kepemilikan asing dan manajemen laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap dugaan praktik manajemen laba.

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H4 : Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap dugaan praktik manajemen laba

### **2.3.5 Good Corporate Governance dan Manajemen Laba**

*Corporate Governance* Adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin keberlangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. *Corporate governance* merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengurangi *agency problem* dengan peningkatan pemantauan terhadap manajemen, membatasi perilaku oportunistik manajer, dan mengurangi risiko informasi yang ditanggung oleh pemegang saham (Rebecca dan Siregar, 2012). Sehingga apabila *Corporate governance* diterapkan dengan baik dalam suatu perusahaan maka dapat mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajer.

Penelitian Agustin (2012), menunjukkan bahwa kualitas GCG yang dijelaskan dengan skor dalam CGPI berpengaruh terhadap manajemen laba. Artinya semakin besar skor dalam CGPI semakin baik kualitas GCG suatu perusahaan sehingga tindak manajemen laba yang dilakukan semakin kecil.

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H5 : *Good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap dugaan praktik manajemen laba



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:12) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel – variabel penelitian dengan angka dan melalui analisis data dengan prosedur statistik.

##### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2014. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan didapatkan populasi sebanyak 42 perusahaan perbankan yang *listing* di BEI sampai januari 2016. Dari jumlah populasi tersebut, terdapat 19 sampel yang memenuhi kriteria penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
- b. Perusahaan tidak *delisting* pada tahun pengamatan.
- c. Perusahaan perbankan tersebut menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2012-2014.
- d. Laporan tahunan tersebut memiliki data lengkap mengenai variabel penelitian.
- e. Perusahaan tidak melakukan akuisisi.

### 3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

#### 3.3.1 Variabel Penelitian

Menurut Indrianto dan Supomo (2014:147), variabel merupakan proksi (*proxy*) atau representatif dari *construct* yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Variabel memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena yang digeneralisasikan dalam *construct*. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel terikat (*dependen variable*) dan variabel bebas (*independen variable*).

#### 3.3.2 Definisi Operasioanal Variabel

##### 3.3.2.1 Variabel Terikat (*Dependen Variable*)

Menurut Indrianto dan Supomo (2014:63), variabel terikat (*Dependen Variable*) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba.

Berdasarkan penelitian Nasution dan Setiawan (2007), manajemen laba diproksikan oleh akrual kelolaan yang dideteksi dengan model akrual khusus Beaver dan Engel (1996). Model Beaver dan Engel dalam penelitian ini sama seperti model yang digunakan oleh Indriani (2010) dan Amijaya (2013). Model tersebut sebagai berikut:

$$TA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it+1} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

$TA_{it}$  = Total Akrual

$CO_{it}$  = *loan charge off* (Kredit yang dihapus bukukan) dicerminkan dari agunan yang diambil alih dengan pertimbangan agunan tersebut menghapus kredit macet dengan penyerahan pinjaman

$LOAN_{it}$  = *loans outstanding* (pinjaman yang beredar)

$NPA_{it}$  = *non performing assets* (aktiva produktif yang bermasalah), terdiri dari aktiva produktif yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya digolongkan

menjadi (a) dalam kolektabilitas lancar, (b) kurang lancar, (c) diragukan, dan (d) macet.

$\Delta NPA_{it+1}$  = selisih *non performing assets* satu tahun kedepan dengan *non performing assets* t

$$NDA_{it} = TA - (\beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it+1})$$

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$$

Dimana:

$TA_{it}$  adalah total akrual yang dihitung dengan saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP),  $NDA_{it}$  adalah non akrual diskresioner, dan  $DA_{it}$  adalah *discretionary accrual* (akrual diskresioner).

### 3.3.2.2 Variabel Bebas (*Independen Variable*)

Menurut Indrianto dan Supomo (2014:63), variabel bebas (*Independen Variable*) adalah variabel yang diduga sebagai akibat (*presumed effect variable*). Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan dan pengungkapan *Good Corporate Governance*.

a. Struktur kepemilikan diproksikan dengan:

#### 1. kepemilikan Keluarga

kepemilikan keluarga dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan. Penelitian Arifin (2003) dalam Siregar dan Utama (2005) mendefinisikan keluarga dalam suatu perusahaan yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat) yang bukan perusahaan publik, Negara, institusi keuangan, publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat)

## 2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner *et al*, 2003 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, misalnya: asuransi, bank, dana pensiun, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Siregar & Utama, 2006). Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Seluruh Saham yang Beredar}}$$

## 3. Kepemilikan Pemerintah

Dalam penelitian ini kepemilikan pemerintah diukur menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki pemerintah dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah Saham Pemerintah}}{\text{Jumlah Seluruh Saham yang Beredar}}$$

## 4. Kepemilikan Asing

Dalam penelitian ini kepemilikan asing diukur menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Saham Asing}}{\text{Jumlah Seluruh Saham yang Beredar}}$$

### b. Pengungkapan *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan indeks *Corporate governance* (GCI) yang dikembangkan oleh Siagian, Siregar dan Rahardian (2011) menggunakan *checklist corporate governance*. *Checklist* tersebut diselesaikan menggunakan data sekunder dari laporan tahunan. Penelitian tersebut menyesuaikan *checklist* dari IICG. Daftar *Checklist* dapat dilihat di lampiran 3.

Pertanyaan dalam *checklist* dibagi dalam lima kelompok menurut prinsip OECD, yaitu :

No	Pengelompokan menurut OECD	Bobot
1	Hak pemegang saham	20%
2	Perlakuan yang adil dari pemegang saham	15%
3	Peran stakeholder	15%
4	Pengungkapan dan transparansi	25%
5	Tanggungjawab dewan	25%

Untuk mengetahui hasil akhir dari CGI yaitu menggunakan metode rata-rata tertimbang dengan mengalikan nilai yang diperoleh dengan bobot yang telah ditetapkan pada masing-masing bagian. Apabila perusahaan mengungkapkan pertanyaan yang disebutkan dalam *checklist* maka diberi nilai 1 dan jika tidak mengungkapkan maka diberi nilai 0.

### 3.4 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dalam bentuk pengujian hipotesis dengan metode kausalitas yaitu metode dengan mengukur pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan, kepemilikan asing dan pengungkapan *good corporate governance*. Sedangkan variabel dependen yaitu manajemen laba.

### 3.5 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Indrianto dan Supomo (2014:147), Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan

historis yang telah tersusun dalam dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data dalam penelitian ini berupa laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan perbankan yang menjadi obyek dalam penelitian ini periode 2012-2014. Data laporan tahunan diambil dari website IDX (*Indonesian Stock Exchange*) yaitu <http://www.idx.co.id>.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Untuk mempermudah melakukan analisis data digunakan *Statistical Package for Social science* (SPSS). Uji asumsi klasik meliputi uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

#### **3.7.1 Statistik Deskriptif**

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014: 170), statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif umumnya digunakan peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada).

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kurtosis dan kemencengan distribusi. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai deskriptif variabel-variabel yang terdiri dari variabel

independen yaitu kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, indeks GCG dan variabel dependen yaitu manajemen laba.

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini sehingga tidak menimbulkan bias dalam analisis data. Uji asumsi terdiri dari uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas (Ghozali, 2009 dalam Indriani 2010).

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013:160).

##### 1. Analisis grafik

Salah satu cara temudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probalility* plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

##### 2. Uji statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh karena itu disamping uji grafik juga dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H<sub>0</sub> : Data residual berdistribusi normal

H<sub>A</sub> : Data residual tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolinearitas diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013:105).

Ghozali (2006) dalam Widiatmaja (2010), menjelaskan bahwa pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya jika tolerance  $< 0,10$  dan VIF  $> 10$ , maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskesdatisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskesdatisitas (Ghozali, 2013:139).

Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas ini dilakukan metode *scatter plot* yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatter plot* yaitu: melihat grafik plot antara prediksi variabel terikat, apabila dalam grafik *scatter plot*

SRESID dan residual ZPRED dimana sumbu Y telah diprediksi dan sumbu X sebagai residual. Hal ini telah terjadi heteroskedastisitas (Dewi, 2013).

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Salah satunya yaitu Uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, sebagai berikut :

- 1) Jika  $0 < d < d_L$ , maka tidak ada autokorelasi positif, hipotesis di tolak.
- 2) Jika  $d_L \leq d \leq d_U$ , maka tidak ada autokorelasi positif, tidak ada keputusan / tidak dapat disimpulkan.
- 3) Jika  $4-d_L < d < 4$ , maka tidak ada autokorelasi negatif, hipotesis ditolak.
- 4) Jika  $4-d_U < d < 4-d_L$ , maka tidak ada autokorelasi negatif, tidak dapat disimpulkan.
- 5) Jika  $d_U < d < 4-d_U$ , maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

### 3.7.3 Uji Hipotesis

#### 3.7.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$DA = \alpha + \beta_1 \text{FAM} + \beta_2 \text{INST} + \beta_3 \text{GOV} + \beta_4 \text{FOR} + \beta_5 \text{GCG} + e$$

Keterangan :

DA = *discretionar accruals* (proksi dari manajemen laba)

$\alpha$  = konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5}$  = koefisien regresi

FAM = Kepemilikan Keluarga

INST = Kepemilikan Institusional

GOV = Kepemilikan Pemerintah

FOR = Kepemilikan Asing

GCG = GCG

e = koefisien eror

### 3.7.3.2 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinasi *adjusted*  $R^2$  pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilainya berkisar antara nol dan satu. Nilai *adjusted*  $R^2$  yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

### 3.7.3.3 Uji Statistika (f-test)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:98).

### 3.7.3.4 Uji Statistika t (t-test)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013:98).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing, serta pengungkapan GCG terhadap dugaan praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan.

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS serta uraian pembahasan yang telah disebutkan pada bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian menerima H1 yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap dugaan praktik manajemen laba.
2. Hasil penelitian menerima H2 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap dugaan praktik manajemen laba.
3. Hasil penelitian menerima H3 yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
4. Hasil penelitian menolak H4 yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap dugaan praktik manajemen laba. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen laba.
5. Hasil penelitian menolak H6 yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen laba.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada subsektor perbankan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel struktur kepemilikan dan indeks GCG sebagai proksi pengungkapan *Good Corporate Governance*. Variabel tersebut hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 54,6%.
3. Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini hanya kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing

## 5.3 Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel perusahaan dengan menambah sektor perusahaan seperti sektor keuangan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang lebih sesuai untuk mendeteksi praktik manajemen laba dan dapat menggunakan proksi GCG yang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk memprediksi manajemen laba.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat menguji struktur kepemilikan perusahaan yang lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, Tarmizi. 2008. *Concentrated Family Ownership Structures Weakening Corporate Governance: A Developing Country Story the Case of Indonesian Companies*. *Jurnal MAKSI*. vol.8 No.2 Agustus 2008:118-134
- Adiasih, Priskila dan Kusuma, Indra Wijaya. 2011. *Manajemen Laba Pada Saat Pergantian CEO (Dirut) di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 13, No.2, November 2011: 67-79
- Agustia, Dian. 2013. *Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 15, No.1, Mei 2013
- Agustin, Lia. 2012. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Serta Peringkat CGPI Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Universitas Gunadarma*
- Aji, Bimo Bayu. 2012. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Amijaya, Muhammad Dody. 2013. *Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Boediono, Gideon SB. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisa Jalur*. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Solo, 15-16 September 2005
- Chin, C.L, Y.J Chen, and T.J, Hsieh. 2009. *International Diversification, Ownership Structure, Legal Origin and Earnings Management: Evidence from Taiwan*. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 24, 233-362
- Darmaji, Salim dan Sodikin, Achmad. 2013. *Information Disclosure by Family-Controlled Firms*. *Asian Review of Accounting*. Vol.21, No.3, 2013

- Dewi, Novia Shinta. 2013. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Earnings Management*. Skripsi. Jember: Universitas Jember
- Farhana, Nor. 2015. *The Impact of Governance Ownership on Earnings Management Practices in Malaysian Public Listed Companies. Proceeding-Kuala Lumpur International Communication, Education, Language and Social Sciences 1 (KLICELLS)*, 17-18 Oktober, 2015
- Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadiprajitno, Basuki Paulus. 2013. Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan Biaya Keagenan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 9, No.2 Mei 2013.
- Hartanto, Dedy dan Nugrahanti, Yeterina Widi. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Struktur Modal Terhadap manajemen Laba. *Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana*
- Indriani, Yohana. 2010. *Pengaruh Kualitas Auditor, Corporate Governance, Leverage dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Kaihatu, Thomas S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.8, No.1, maret 2006:1-9.
- Kalamullah, Rayhan. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Sektor *Property* yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Universitas Gunadarma*
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. [http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia\\_cg\\_2006\\_id.pdf](http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf). [Diakses pada 29 Oktober 2015]

- KNKG. 2012. *Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* [Diakses pada 29 Oktober 2016]
- Maksum, Azhar. 2005. *Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen*. 17 Desember. Medan. Universitas Sumatra Utara
- Muliati, Ni Ketut. 2011. *Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan Pada Praktik Manajemen Laba Di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Tesis. Denpasar: Universitas Udayana
- Naftalia, Veliandina Chivan. 2013. *Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Nasution, Morihot dan Doddy Setiawan. 2007. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar
- Noviardhi, Mahendra taufiq dan Hadiprajitnoo, P. Basuki. 2013. *Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba*. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.2, No.2, tahun 2013, Hal.1 ISSN (Online): 2337-3806
- Nugraha, Vendi Cahya. 2010. *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba (Earnings Management) dalam Industri Manufaktur dan Non Manufaktur Periode 2001-2006 di Indonesia*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- OJK. Siaran Pers OJK Awasi 50 Konglomerasi Keuangan. <http://webojk.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Awasi-50-Konglomerasi-Keuangan.aspx>. [Diakses pada 21 Desember 2015]
- Pradipta, Arya. 2011. *Analisis Pengaruh Dari Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol 13, No.2, Hlm. 93-106, Agustus 2011

- Rebecca, Yulisa dan Siregar, Sylvia Veronica. 2012. Pengaruh *Corporate Governance Index*, Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang: Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin
- Santoso, Agnes Febriana dan Pudjalaksono, Eko. 2013. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Earnings Management* Pada Badan Usaha Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.2, No.2
- Sekaredi, Sawitri. 2011. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Setiawan, Dedi. 2013. *Analisis Pengaruh Earning Power, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing Terhadap Manajemen Laba*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Setiawan, Teguh. 2009. Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2006. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol.1 No.2, Hlm. 99-122, Juli 2009.
- Siagian, Ferdinand T. 2011. *Ownership Structure and Governance Implementation: Evidence from Indonesia*. *International Journal of Business, Humanities and Technology*, Vol.1 No.3: November 2011.
- Siagian, Ferdinand T., Siregar, Sylvia Veronica., and Rahadian, Yan. 2011. *Corporate Governance, Disclosure Quality, Ownership Structure, and Firm Value*. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, Forthcoming
- Siregar, Sylvia Veronica dan Utama, Siddhrta. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktik *Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Laba (*Earnings Management*). *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Sulistyanto, Sri. 2008. *Manajemen Laba: Teori dan Model Impiris*. Jakarta: PT Grasindo

- Surya, Indra dan Yustiawandana, Ivan. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ujiyantho, Muh. Arief dan Pramuka, Bambang Agus. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar
- Verawati, Diana. 2012. *Pengaruh Diversifikasi Operasi, Diversifikasi Geografis, Leverage dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Wahyono, R. Erdianto Setyo., Wahidawati., dan Sunaryo, Agus. 2013. *Pengaruh Corporate Governance Pada Praktik Manajemen Laba: Studi Pada Industri Perbankan Indonesia. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.1, No.2, maret 2013
- Widiatmaja, Bayu Fatma. 2010. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dan Konsekuensi Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wiranata, Yulius Ardy dan Nugrahanti, Yeterina Widi. 2013. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 15, No. 1, Mei 2013
- Wulandari, Rahmita. 2013. *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Manajemen Laba*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Merdeka.com. 2013. *4 konglomerasi yang dekat dengan Suharto*. <http://www.merdeka.com/peristiwa/4-konglomerat-yang-dekat-dengan-soeharto/liem-sioe-liong.html> [Diakses pada 21 Januari 2016]
- Suara Merdeka.1997. *Konglomerasi, Proteksi, dan Konsentrasi Industri* <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/03/24/0023.html> [Diakses pada 18 Desember 2015]
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) [Diakses pada 30 Januari 2016]

**LAMPIRAN 1**

**DAFTAR PERUSAHAAN PERBANKAN**

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk
2	BBCA	Bank Central Asia Tbk
3	BBKP	Bank Bukopin Tbk
4	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk
5	BBRI	Bank Rakyat Indonesia Tbk
6	BCIC	Bank Mutiara Tbk
7	BDMN	Bank Danamon Tbk
8	BJBR	Bank Jabar Banten Tbk
9	BJTM	Bank Jatim Tbk
10	BMRI	Bank Mandiri Tbk
11	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
12	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk
13	BNLI	Bank Permata Tbk
14	BSIM	Bank Sinar Mas Tbk
15	BVIC	Bank Victoria Internasional Tbk
16	INPC	Bank Artha Graha International Tbk
17	MAYA	Bank Mayapada Tbk
18	MCOR	Bank Windu Kentjana International Tbk
19	NISP	Bank OCBC NISP Tbk

## LAMPIRAN 2

### VARIABEL DEPENDEN

NO	BANK	PPAP	CO	LOAN	NPA	ΔNPA	Dait2012
1	AGRO	38,977	28,744	2,531,073	0.0298	-0.0006	4.1636
2	BBCA	499,000	439,406	256,778,000	0.004	0	6.2292
3	BBKP	972,000	176,904	45,531,000	0.0223	-0.0019	5.5576
4	BBNI	2,525,000	2,266,000	200,742,000	0.0211	-0.0054	6.2883
5	BBRI	2,700,000	4,450,000	362,007,000	0.0146	-0.0039	6.5026
6	BCIC	1,424,875	161,992	11,148,050	0.1098	-0.0179	5.8744
7	BDMN	3,151,000	2,545,426	116,583,000	0.02	-0.001	5.9663
8	BJBR	403,388	355,633	38,332,712	0.0127	0.0054	5.3083
9	BJTM	255,666	151,590	18,556,329	0.0223	0.0008	5.0783
10	BMRI	3,423,067	2,462,911	388,830,299	0.0145	-0.0014	6.5354
11	BNGA	1,142,889	519,768	145,399,129	0.0223	-0.0032	6.1485
12	BNII	259,907	1,188,797	79,827,388	0.0164	-0.0041	5.7622
13	BNLI	498,724	682,679	93,705,893	0.0122	-0.0055	5.8181
14	BSIM	92,375	2,444	10,293,836	0.0263	0.0202	4.7809
15	BVIC	100,854	29,164	7,580,958	0.0137	0.0004	4.5522
16	INPC	10,201	305,881	15,212,135	0.0073	-0.0154	4.8916
17	MAYA	86,304	1,195	12,216,247	0.025	0.0051	4.9561
18	MCOR	32,586	7,933	4,525,245	0.0175	0.0013	4.3445
19	NISP	246,816	29,153	51,874,088	0.0066	-0.0034	5.4964

NO	BANK	PPAP	CO	LOAN	NPA	ΔNPA	Dait2013
1	AGRO	29,192	23,355	3,698,593	0.017	-0.0228	4.3529
2	BBCA	2,016,000	386,512	312,290,000	0.005	-0.001	6.35
3	BBKP	832,000	123,347	48,461,000	0.0179	-0.0044	5.5631
4	BBNI	2,708,000	2,396,000	250,638,000	0.0147	-0.0164	6.3962
5	BBRI	3,946,000	4,320,000	448,345,000	0.0128	-0.0018	6.5827
6	BCIC	2,547,872	-	11,131,807	0.2023	0.0925	6.4707
7	BDMN	3,348,000	2,810,826	135,383,000	0.016	-0.004	6.0158
8	BJBR	616,067	271,059	48,902,340	0.0221	0.0094	5.5194
9	BJTM	525,628	325,991	22,084,336	0.0295	0.0072	5.1961
10	BMRI	4,871,442	2,304,223	472,435,041	0.0143	-0.0002	6.6287
11	BNGA	1,203,481	726,155	156,984,105	0.021	-0.0013	6.157
12	BNII	234,249	906,857	100,977,345	0.0201	0.0037	5.8848
13	BNLI	502,595	629,880	118,368,843	0.0091	-0.0031	5.8934
14	BSIM	56,581	10,233	10,909,738	0.0188	-0.0075	4.8621
15	BVIC	56,142	25,466	11,057,798	0.0045	-0.0192	4.7635
16	INPC	78,796	124	15,431,270	0.0164	0.0091	5.003
17	MAYA	41,102	919,836	17,683,639	0.0087	-0.0163	4.9697
18	MCOR	22,590	538	5,483,875	0.0146	-0.0029	4.4872
19	NISP	259,104	102,673	62,706,614	0.0066	0	5.5519

<b>NO</b>	<b>BANK</b>	<b>PPAP</b>	<b>CO</b>	<b>LOAN</b>	<b>NPA</b>	<b>ΔNPA</b>	<b>Dait2014</b>
1	AGRO	39,862	40,345	4,694,580	0.0156	-0.0014	4.3281
2	BBCA	2,239,000	656,120	346,563,000	0.006	-0.001	6.4052
3	BBKP	920,000	95,095	55,263,000	0.0212	0.0033	5.6279
4	BBNI	3,642,000	3,600,000	277,622,000	0.014	-0.0007	6.3437
5	BBRI	5,719,000	5,620,000	510,697,000	0.0126	-0.0002	6.634
6	BCIC	2,181,199	355,719	7,844,302	0.2221	0.0198	6.6849
7	BDMN	3,986,000	2,431,278	139,057,000	0.019	0.003	6.0248
8	BJBR	662,681	198,894	54,017,114	0.0293	0.0072	5.6682
9	BJTM	650,616	378,917	26,194,879	0.0264	-0.0031	5.3076
10	BMRI	5,718,130	2,986,162	529,973,541	0.0142	-0.0001	6.682
11	BNGA	3,466,274	1,023,257	176,383,449	0.0353	0.0143	6.2773
12	BNII	239,775	1,236,953	104,903,697	0.0214	0.0013	5.9269
13	BNLI	1,178,152	643,784	131,388,463	0.0139	0.0048	5.9541
14	BSIM	75,078	17,334	14,223,357	0.0233	0.0045	4.9701
15	BVIC	44,712	27,751	12,245,677	0.0225	0.018	4.797
16	INPC	132,027	320	17,150,089	0.0163	-0.0001	5.0921
17	MAYA	1,493	1,142,605	26,004,334	0.0118	0.0031	5.0882
18	MCOR	23,612	868	6,908,478	0.0237	0.0091	4.6285
19	NISP	221,335	54,520	66,933,612	0.011	0.0044	5.6203

STRUKTUR KEPEMILIKAN TAHUN 2012

NO	BANK	FAM	INST	GOV	FOR
1	AGRO	0.00%	93.75%	0.00%	0.03%
2	BBCA	4.51%	0.00%	0.00%	47.15%
3	BBKP	0.00%	46.18%	13.04%	0.00%
4	BBNI	0.00%	12.41%	60.00%	24.94%
5	BBRI	0.00%	0.00%	56.75%	35.83%
6	BCIC	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
7	BDMN	0.00%	6.38%	0.00%	67.37%
8	BJBR	0.00%	11.97%	75.00%	7.28%
9	BJTM	0.00%	9.96%	80.00%	2.16%
10	BMRI	0.00%	6.69%	60.00%	32.26%
11	BNGA	0.00%	0.00%	0.00%	97.90%
12	BNII	0.00%	0.00%	0.00%	97.29%
13	BNLI	0.00%	44.56%	0.00%	44.56%
14	BSIM	3.56%	56.40%	0.00%	6.55%
15	BVIC	23.02%	34.86%	0.00%	8.85%
16	INPC	56.06%	0.00%	0.00%	19.35%
17	MAYA	28.51%	0.00%	0.00%	59.86%
18	MCOR	86.06%	0.00%	0.00%	0.00%
19	NISP	0.00%	0.00%	0.00%	85.10%

STRUKTUR KEPEMILIKAN TAHUN 2013

NO	BANK	FAM	INST	GOV	FOR
1	AGRO	0.00%	94.66%	0.00%	0.03%
2	BBCA	4.51%	0.00%	0.00%	47.15%
3	BBKP	0.00%	44.68%	12.22%	0.00%
4	BBNI	0.00%	11.71%	60.00%	26.57%
5	BBRI	0.00%	0.00%	56.75%	34.14%
6	BCIC	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
7	BDMN	0.00%	6.40%	0.00%	67.37%
8	BJBR	0.00%	6.06%	75.00%	14.79%
9	BJTM	0.00%	3.73%	80.00%	8.73%
10	BMRI	0.00%	8.23%	60.00%	30.42%
11	BNGA	0.00%	0.00%	0.00%	97.90%
12	BNII	0.00%	0.00%	0.00%	97.29%
13	BNLI	0.00%	44.56%	0.00%	44.56%
14	BSIM	2.80%	57.17%	0.00%	0.00%
15	BVIC	22.94%	34.72%	0.00%	8.82%
16	INPC	51.17%	0.00%	0.00%	13.86%
17	MAYA	28.51%	0.00%	0.00%	56.97%
18	MCOR	85.34%	0.00%	0.00%	0.00%
19	NISP	0.00%	0.00%	0.00%	85.10%

STRUKTUR KEPEMILIKAN TAHUN 2014

NO	BANK	FAM	INST	GOV	FOR
1	AGRO	0.00%	94.42%	0.00%	0.03%
2	BBCA	4.49%	0.00%	0.00%	47.15%
3	BBKP	0.00%	48.09%	11.44%	0.00%
4	BBNI	0.00%	10.01%	60.00%	28.72%
5	BBRI	0.00%	0.00%	56.75%	35.68%
6	BCIC	0.00%	1.00%	0.00%	99.00%
7	BDMN	0.00%	6.79%	0.00%	67.37%
8	BJBR	0.00%	4.01%	75.00%	13.73%
9	BJTM	0.00%	2.91%	80.00%	10.66%
10	BMRI	0.00%	7.19%	60.00%	31.89%
11	BNGA	0.00%	0.00%	0.00%	97.90%
12	BNII	0.00%	0.00%	0.00%	97.29%
13	BNLI	0.00%	44.56%	0.00%	44.56%
14	BSIM	2.62%	53.41%	0.00%	0.00%
15	BVIC	21.30%	39.37%	0.00%	8.19%
16	INPC	51.17%	0.00%	0.00%	15.47%
17	MAYA	28.51%	0.00%	0.00%	57.31%
18	MCOR	85.34%	0.00%	0.00%	0.00%
19	NISP	0.00%	0.00%	0.00%	85.10%

*SKOR INDEKS GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

<b>NO</b>	<b>BANK</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	AGRO	75.48%	75.48%	75.48%
2	BBCA	78.26%	78.26%	78.26%
3	BBKP	76.98%	76.23%	76.98%
4	BBNI	76.12%	77.51%	77.51%
5	BBRI	81.37%	81.37%	81.37%
6	BCIC	61.56%	61.56%	61.56%
7	BDMN	82.76%	82.76%	82.76%
8	BJBR	73.86%	73.86%	81.36%
9	BJTM	74.95%	75.59%	75.59%
10	BMRI	79.97%	80.73%	81.36%
11	BNGA	79.45%	79.45%	79.45%
12	BNII	76.87%	78.26%	75.48%
13	BNLI	70.34%	74.09%	73.45%
14	BSIM	74.84%	74.84%	74.84%
15	BVIC	74.84%	74.84%	76.23%
16	INPC	67.47%	68.11%	70.88%
17	MAYA	60.71%	60.07%	71.63%
18	MCOR	63.27%	68.76%	70.14%
19	NISP	76.87%	78.90%	79.54%

## LAMPIRAN 3

### CORPORATE GOVERNANCE INDEX

	<b><i>Rights of Shareholders</i></b>
1	Assess the quality of the notice to call the annual general shareholders' meeting (RUPS) in the past one year.
	a) Appointment of directors and commissioners
	b) Appointment of auditors
	c) Dividend payment
2	Is the decision on the remuneration of the board members (commissioners and directors) approved by the
3	Is the remuneration of the board (commissioner and director) presented individually?
4	Do board members hold more than 25% of outstanding shares?
	<b><i>Equitable Treatment of Shareholders</i></b>
1	Have there been any cases of insider trading involving the company directors and commissioners in the past
2	Does the company provide rationale/explanation for related-party transactions affecting the
3	Has there been any non-compliance case regarding related-party transaction in the past two
4	How many days in advance does the company send out the notice of general shareholders'
	<b><i>Role of Stakeholders</i></b>
1	Does the company explicitly mention the safety and welfare of its employees?
2	Does the company explicitly mention the role of key stakeholders such as customers or the community at large (or creditors or suppliers)
3	Does the company explicitly mention environmental issues in its public communication?
4	Does the company provide an ESOP (Employee Stock Option Plan) or other long-term employee incentive
	<b><i>Disclosure and Transparency</i></b>
1	Does the company have dispersed ownership structure?
2	Assess the quality of financial report in each of the following areas:
	a) Financial performance
	b) Business operations and competitive position
	d) Basis of board remuneration
	e) Operating risk
3	Is there any statement requesting the directors to report their transactions of company shares?
4	Does the company have an internal audit operation established as a separate unit in the
5	Are there any accounting qualifications in the audited financial statements apart from the qualification on
6	Does the company offer multiple channels of access to information, include:
	a) Company website
	b) Analyst briefing
	c) Press conference/press briefing
7	Is the financial report disclosed in a timely manner?
8	Does the company have a website disclosing up-to-date information, include:
	a) Business operation
	b) Financial statement
	c) Press release
	d) Shareholding structure

	e) Organization structure
	f) Corporate group structure
	g) Downloadable annual report
	h) Downloadable interim report
	i) Available of both Indonesian and English
9	Does the company disclose fees paid to external auditors?
10	Does the company's Annual Report include a section devoted to the company's performance in
11	If the complete list of BOC members is disclosed, is detailed information on each
12	If the complete list of BOC members is disclosed, does it include details of previous
13	If the complete list of BOC members is disclosed, are educational qualifications of commissioners
14	If the complete list of BOC members is disclosed, are other commissionerships of
	<b>Responsibility of the Board</b>
1	Does the company have its own written corporate governance rules that clearly describe its value system
2	Does the board of commissioner provide code of ethics or statement of business conduct to all directors and
3	Is there disclosure of company's guidelines of matters that require approval by the board of
4	Does the annual report include report from board of commissioners?
5	Does the company have a corporate vision/mission?
6	Does the JSX/Bapepam have any evidence of non-compliance of the company with JSX/Bapepam rules and
7	Have board members participated in corporate governance training?
8	Does the company report board meeting attendance of individual board of commissioner
9	How many times board of commissioner meet in the calendar year?
10	Does the company report board meeting attendance of individual board of director members?
11	How many times board of director meet in the calendar year?
12	Among board of commissioners, how many are independent commissioners?
13	Is the board of commissioner chairman an independent commissioner?
14	Does the company state in its annual report the definition of independence?
15	What is the size of board of commissioner?
16	Is individual performance of BOC members evaluated?
17	Is criteria for evaluating board of director performance disclosed?
18	Does the board appoint independent committees with independent members to carry out various critical
	a) Audit committee
	b) Compensation committee
	c) Director or nomination committee
19	Assess the audit committee based on following criteria:
	a) Audit committee size
	b) Independent members
	c) Financial/accounting background
	d) Chairman
20	Is disclosure made of the basis of selection of audit committee members?
21	Does the company disclose audit committee report in the annual report
22	Assess the quality of the audit committee report in the annual report, include the following
	a) Frequency of meetings

	b) Internal control
	c) Management control
	d) Proposed auditors
	e) Financial report review
	f) Legal compliance
	g) Scope, results, and effectiveness of audits
	h) Adequacy of internal audit function
	i) Conclusion or opinion
23	Is the complete list of audit committee members disclosed?
24	Does the corporate secretary attend all board of directors meetings?
25	Does the company provide contact details for a specific investor relation person?
26	Does/did the company have an option scheme for top management?



**LAMPIRAN 4**

**PEMILIHAN SAMPEL PENELITIAN**

**Tabel 4.1 Sampel Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah bank yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014	31
2	Tidak menerbitkan laporan tahunan berurut-urut tahun 2012-2014	0
3	<i>Delisting</i>	0
4	Bank yang tidak memiliki data lengkap mengenai variabel penelitian	(11)
5	Bank yang melakukan akuisisi	(1)
	<b>Jumlah sampel penelitian</b>	<b>19</b>
	<b>Jumlah data penelitian 19x3</b>	<b>57</b>

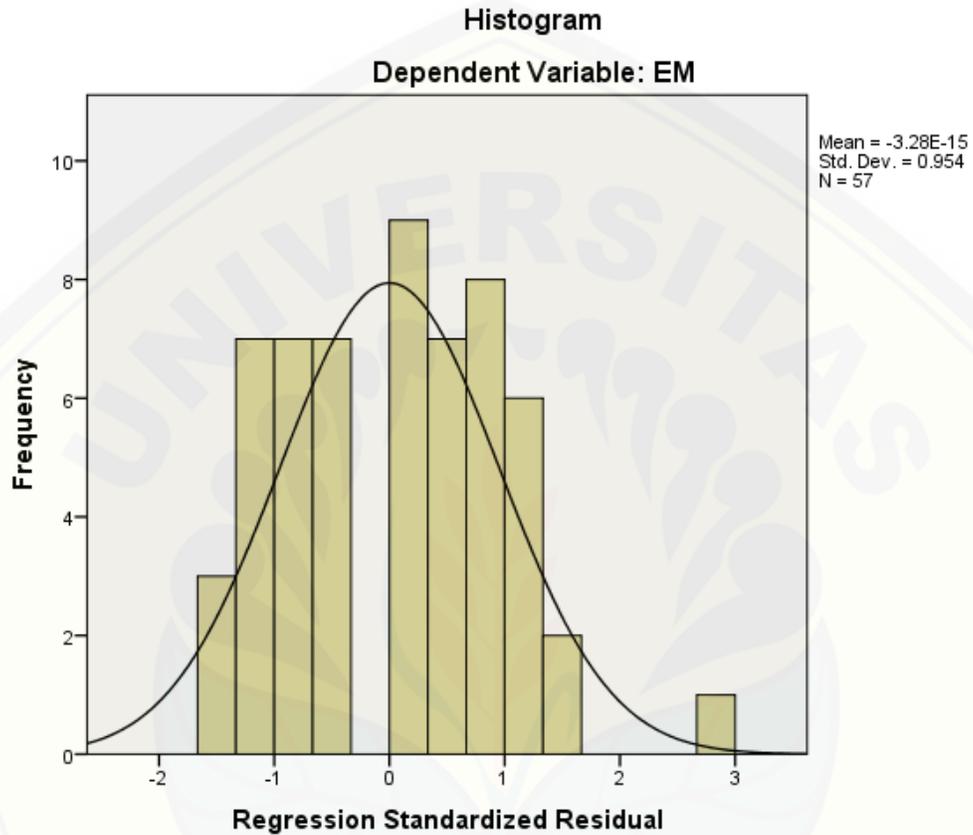
**ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF**

**Descriptive Statistics**

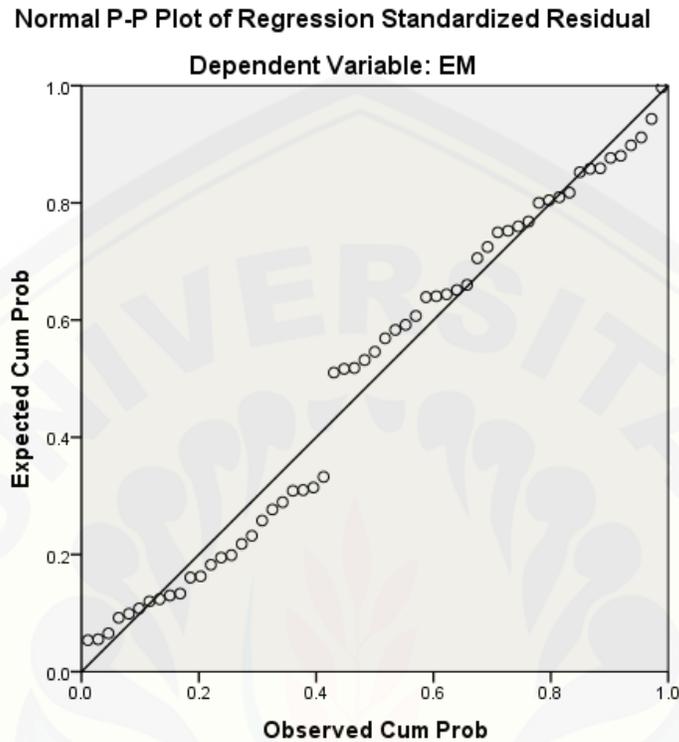
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FAM	57	.00	.86	.1036	.22469
GOV	57	.00	.80	.1810	.29612
INST	57	.00	1.00	.2012	.29959
FOR	57	.00	.99	.3527	.33996
GCG	57	.60	.83	.7492	.05887
EM	57	4.1636	6.6849	5.595853	.7212939
Valid N (listwise)	57				

**UJI NORMALITAS DATA**

**Gambar 4.1 Grafik Histogram**



**Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot**



**Tabel 4.3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.50021835
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.090
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

## UJI MULTIKOLONIERITAS

**Tabel 4.4 Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.092	.098		-.934	.355		
	FAM	-.714	.293	-.478	-2.435	.019	.173	5.783
	INST	-.668	.267	-.602	-2.499	.016	.143	7.010
	GOV	.410	.146	.463	2.809	.008	.230	4.351
	FOR	.042	.236	.046	.179	.859	.150	6.664
	GCG	.065	.159	.050	.410	.684	.556	1.799

a. Dependent Variable: EM

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model			GCG	INST	GOV	FAM	FOR
1	Correlations	GCG	1.000	.435	.230	.548	.311
		INST	.435	1.000	.827	.860	.895
		GOV	.230	.827	1.000	.785	.845
		FAM	.548	.860	.785	1.000	.834
		FOR	.311	.895	.845	.834	1.000
	Covariances	GCG	2.547	.430	.181	.656	.264
		INST	.430	.383	.253	.399	.295
		GOV	.181	.253	.243	.290	.222
		FAM	.656	.399	.290	.562	.333
		FOR	.264	.295	.222	.333	.283

a. Dependent Variable: EM

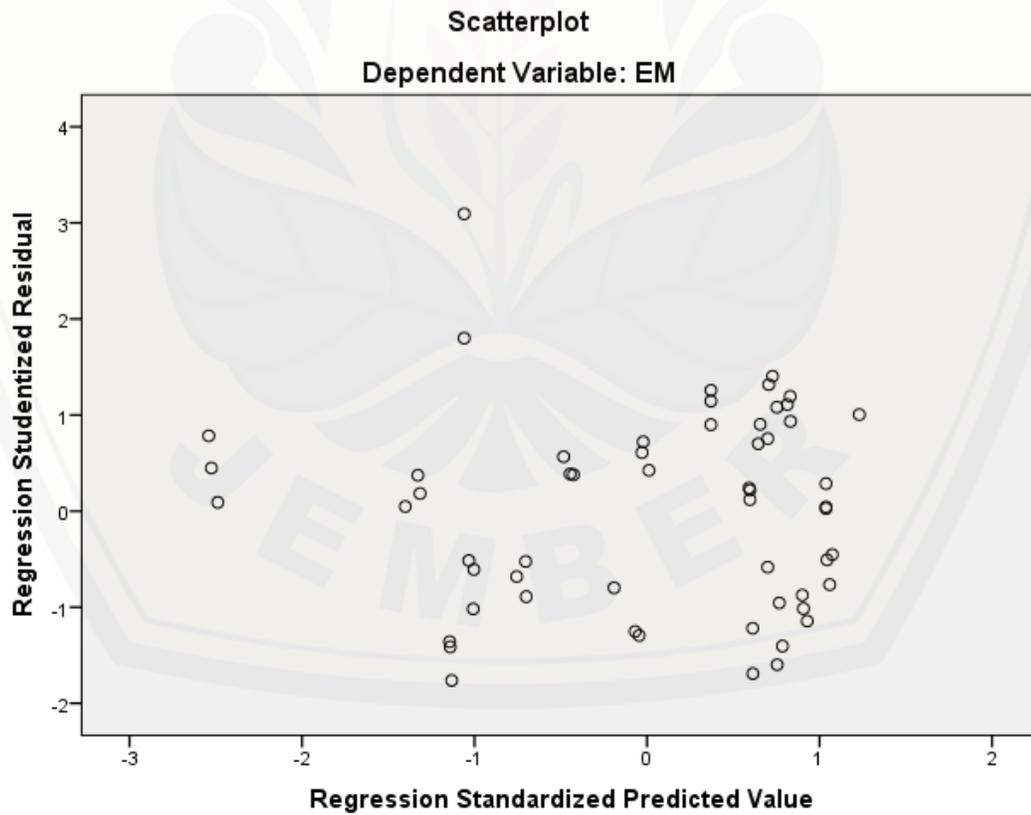
Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	FAM	INST	GOV	FOR	GCG
1	1	3.301	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	1.003	1.814	.00	.10	.00	.05	.00	.00
	3	.920	1.894	.00	.00	.08	.02	.01	.00
	4	.748	2.100	.00	.03	.00	.10	.04	.00
	5	.026	11.245	.01	.40	.56	.68	.71	.04
	6	.001	48.776	.99	.47	.35	.16	.24	.96

a. Dependent Variable: EM

### UJI HETEROKEDASTISITAS

Gambar 4.3 Scatter Plot



## UJI AUTOKORELASI

Tabel 4.5 Uji Durbin Watson

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	GCG, INST, GOV, FAM, FOR <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: EM

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.720 <sup>a</sup>	.519	.472	.5241656	1.769

a. Predictors: (Constant), GCG, INST, GOV, FAM, FOR

b. Dependent Variable: EM

## UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Variabel	Koefisien regresi	Nilai <i>t test</i>	Signifikan ( <i>p-value</i> )
Konstanta	-0,092	-0,934	0,355
FAM	-0,714	-2,435	0,019
INST	-0,668	-2,499	0,016
GOV	0,410	2,809	0,008
FOR	0,042	0,179	0,859
GCG	0,065	0,410	0,684

$R=0,770$

$R^2=0,593$

*Adj R Square*= 0,546

*Std error of the estimate*= 0,62102401

**Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 <sup>a</sup>	.593	.546	.62102401

a. Predictors: (Constant), GCG, FOR, GOV, FAM, INST

**Tabel 4.7 Uji F (F test)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.211	5	4.842	12.555	.000 <sup>b</sup>
	Residual	16.584	43	.386		
	Total	40.795	48			

a. Dependent Variable: EM

b. Predictors: (Constant), GCG, FOR, GOV, FAM, INST

**Tabel 4.8 Uji T (T test)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.092	.098		-.934	.355
	FAM	-.714	.293	-.478	-2.435	.019
	INST	-.668	.267	-.602	-2.499	.016
	GOV	.410	.146	.463	2.809	.008
	FOR	.042	.236	.046	.179	.859
	GCG	.065	.159	.050	.410	.684

a. Dependent Variable: EM